

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal dapat dilakukan dari dua sisi pengeluaran maupun penerimaan. Desentralisasi fiskal sisi penerimaan lebih ke arah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerahnya sendiri. Sedangkan sisi pengeluaran dana transfer oleh pusat terhadap daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan melalui DAU DAK dan DBH menjadi harapan percepatan pertumbuhan ekonomi. Data dana perimbangan dari tahun 2019-2021 dana perimbangan terbilang naik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal melalui dana perimbangan DAU DAK DBH, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel sebagai alat dalam pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 9. Model regresi yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*.

Berdasarkan analisis statistik pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan dari hasil regresi *robust standard error* menunjukkan secara bersama-sama atau simultan variabel DAU, DBH, IPM dan UKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kecuali DAK yang tidak signifikan dikarenakan kurang efektifnya penggunaan Dana Alokasi Khusus di Indonesia sehingga dapat disimpulkan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia. Dana Alokasi Khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan pendapatan setiap provinsi serta untuk melaksanakan program-program tertentu sebagai bagian dari desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di sebuah provinsi dalam penelitian ini tidak berjalan. Artinya penggunaan DAK di Indonesia dapat disimpulkan tidak berpengaruh di 33 Provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal (DAU DAK DBH), Indeks Pembangunan Manusia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, FEM Hasil *robust standard error*.

ABSTRACT

Fiscal decentralization can be carried out from both expenditure and revenue sides. Revenue-side fiscal decentralization is more towards giving authority to regional governments to manage their own regional revenues. On the other hand, the transfer of funds from the center to the regions is expected to increase economic growth. Balancing funds through DAU DAK and DBH are the hope of accelerating economic growth. Balancing fund data for 2019-2021 balancing funds has increased. The purpose of this study is to find out how the effect of Fiscal Decentralization through DAU DAK DBH balancing funds, the Human Development Index (IPM) and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) affects Economic Growth. This study uses panel data analysis as a tool in data processing using the program Eviews 9. Regression model that combines time series data and cross section.

Based on the statistical analysis in this study, it can be concluded that the results of the robust standard error regression show that simultaneously the DAU, DBH, HDI and UKM variables have a significant effect on economic growth. Except for DAK which is not significant due to the ineffective use of Special Allocation Funds in Indonesia, so it can be concluded that it has no effect on economic growth in provinces in Indonesia. The Special Allocation Fund issued by the central government to balance the income of each province and to carry out certain programs as part of fiscal decentralization can increase regional economic growth in a province in this study. This means that the use of DAK in Indonesia can be concluded that it has no effect in 33 provinces in Indonesia.

Keywords: Economic Growth, Fiscal Decentralization (DAU DAK DBH), Human Development Index, Micro, Small and Medium Enterprises, FEM Robust standard error results.